



Pendidikan untuk mewujudkan keadilan sosial dalam peluang belajar siswa di tengah kesenjangan ekonomi

Septia Rosada¹, Nur Khasanah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: septiarosada24048@mhs.uingusdur.ac.id¹, nur.khasanah@uingusdur.ac.id²

Corresponding Author: septiarosada24048@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

Education plays a crucial role in creating social justice, particularly in ensuring equal access to learning amidst the economic inequality that remains a challenge in Indonesia. In addition to serving as a platform for transferring knowledge, education also serves to shape the character, social values, and personality of students. This research uses a qualitative approach with descriptive methods to explore the relationship between educational policies and learning practices that influence equal learning opportunities at various levels of education. Data were collected through a literature review of books, scientific journals, and policy documents related to social justice issues in education. The results indicate that increasing access to education, equalizing learning facilities and infrastructure, and strengthening teacher competencies in addressing the socioeconomic diversity of students are key factors in realizing educational equality. Therefore, education that is inclusive, equitable, and based on humanitarian values is an essential foundation for building a society that upholds social justice.

Keywords: Education, Social justice, Educational equality, Learning opportunity gap.

ABSTRAK

Pendidikan memegang peranan penting dalam menciptakan keadilan sosial, khususnya dalam memastikan kesetaraan akses belajar di tengah ketimpangan ekonomi yang masih menjadi tantangan di Indonesia. Selain sebagai wadah transfer ilmu pengetahuan, pendidikan juga berfungsi dalam membentuk karakter, nilai-nilai sosial, serta kepribadian peserta didik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menelusuri keterkaitan antara kebijakan pendidikan dan praktik pembelajaran yang berpengaruh terhadap pemerataan kesempatan belajar di berbagai jenjang pendidikan. Data penelitian dikumpulkan melalui kajian literatur berupa buku, jurnal ilmiah, serta dokumen kebijakan yang berkaitan dengan isu keadilan sosial dalam bidang pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan akses terhadap pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana belajar, serta penguatan kompetensi guru dalam menghadapi keragaman sosial ekonomi peserta didik merupakan faktor utama dalam mewujudkan kesetaraan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang bersifat inklusif, berkeadilan, dan berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan menjadi fondasi esensial bagi terbangunnya masyarakat yang menjunjung tinggi keadilan sosial.

Kata kunci: Pendidikan, Keadilan sosial, Kesetaraan pendidikan, Kesenjangan peluang belajar.



PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dan mendasar dalam menciptakan keadilan sosial serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Namun demikian, tingginya tingkat kesenjangan ekonomi masih menjadi hambatan utama dalam upaya mewujudkan pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap ketimpangan ekonomi antara lain sulitnya akses menuju lembaga pendidikan, ketidakseimbangan kualitas pendidikan antar daerah, serta keterbatasan sarana dan prasarana sekolah (Hujaimah et al., 2023). Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas sering kali menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan yang berkualitas. Situasi ini berpotensi memperlebar jurang ketimpangan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ditegaskan bahwa: "(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah bertanggung jawab untuk membiayainya. (3) Pemerintah menyelenggarakan sistem pendidikan nasional guna mencerdaskan kehidupan bangsa. (4) Pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD. (5) Pemerintah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tetap berlandaskan nilai-nilai agama serta semangat persatuan bangsa." Ketentuan ini menegaskan bahwa hak memperoleh pendidikan dimiliki oleh seluruh warga negara, dan pemerintah memikul tanggung jawab utama dalam memastikan tersedianya layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi semua. Namun, implementasi prinsip keadilan dalam pendidikan sebagaimana diamanatkan konstitusi tersebut masih belum terlaksana secara merata. Hal ini terlihat dari masih adanya ketimpangan akses pendidikan akibat faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Pemerataan akses pendidikan, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), masih menjadi persoalan yang cukup kompleks bagi pemerintah. Beragam inisiatif telah dilakukan, seperti pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP/KIP-K), penyediaan sekolah tanpa biaya, serta penerapan berbagai kebijakan pendukung lainnya. Namun demikian, keterbatasan sarana dan prasarana, minimnya tenaga pendidik, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum merata tetap menjadi tantangan besar dalam mewujudkan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas di seluruh penjuru Indonesia (Vega et al., 2025).

Ketimpangan dalam bidang pendidikan dan pendapatan memiliki hubungan yang saling memengaruhi. Ketidakseimbangan pendidikan berbanding lurus dengan perbedaan tingkat pendapatan antarwilayah; daerah dengan kualitas pendidikan yang rendah cenderung memiliki pendapatan masyarakat yang rendah pula (Sihombing, 2023). Secara teoritis, hubungan ini bersifat timbal balik: semakin rendah pemerataan pendidikan di suatu daerah, semakin besar pula kemungkinan terjadinya ketimpangan sosial dan ekonomi (Wardana et al., 2019).

Penelitian ini dilandasi oleh kenyataan bahwa ketimpangan pendidikan masih menjadi faktor utama yang menghambat terwujudnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Ketidakseimbangan dalam akses dan kualitas pendidikan berdampak pada rendahnya mobilitas sosial dan memperkuat rantai



kemiskinan di masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji peran pendidikan dalam mencegah ketidaksetaraan sosial ekonomi serta dalam mewujudkan pemerataan kesempatan belajar di berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun empiris terhadap kebijakan pemerataan pendidikan, terutama dalam hal peningkatan akses, mutu, dan relevansi pendidikan di wilayah 3T.

Berbagai langkah strategis dapat ditempuh untuk memperkecil kesenjangan pendidikan, di antaranya melalui kebijakan afirmatif berupa pemberian beasiswa bagi peserta didik kurang mampu, peningkatan kualitas dan kompetensi guru di daerah tertinggal, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pemerataan pendidikan. Melihat kondisi yang ada, diperlukan langkah konkret dan berkesinambungan agar pendidikan benar-benar berperan sebagai instrumen keadilan sosial dan pemerataan kesempatan belajar di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada analisis peran pendidikan dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah kesenjangan ekonomi yang masih tinggi. Dengan demikian, temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, merata, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh data dan informasi melalui penelaahan berbagai sumber yang relevan dan terpercaya (Cahyono, 2021). Metode studi pustaka dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pendidikan, keadilan sosial, serta kesenjangan ekonomi melalui proses interpretasi dan analisis terhadap literatur ilmiah yang telah ada. Selain itu, metode ini juga memberikan peluang bagi peneliti untuk menggabungkan berbagai temuan penelitian sebelumnya yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun revisi lainnya (Kamaruddin, 2025).

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri atas buku dan jurnal ilmiah nasional yang membahas isu-isu terkait pendidikan, keadilan sosial, pemerataan kesempatan belajar, serta kesetaraan dalam bidang pendidikan. Di samping itu, digunakan pula literatur pendukung berupa laporan penelitian, dokumen resmi, serta referensi akademik daring yang diperoleh melalui situs seperti *Google Scholar*, *DOAJ*, dan *Perpusnas Jurnal*. Semua literatur yang dipilih diseleksi secara ketat berdasarkan relevansi dengan tema penelitian, yakni pemerataan kesempatan belajar dan penerapan keadilan sosial dalam pendidikan. Proses seleksi dilakukan untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan bersifat valid, kredibel, dan dapat mendukung analisis secara ilmiah. Nilai keadilan sosial dan budaya yang terkandung dalam pendidikan inklusif dijadikan dasar dalam menelaah pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh peserta didik (Saing et al., 2023).

Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber literatur menggunakan kata kunci seperti keadilan sosial dalam pendidikan,



pemerataan kesempatan belajar, dan kesenjangan ekonomi dalam akses pendidikan. Pencarian literatur dilakukan melalui sejumlah basis data akademik, antara lain Google Scholar, Perpustakaan Nasional, dan JSTOR. Setiap hasil pencarian kemudian diseleksi berdasarkan tingkat relevansi topik, kredibilitas penulis, serta tahun penerbitannya, sehingga data yang digunakan bersifat aktual, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga menilai kesesuaian isi dan metode penelitian yang digunakan dalam setiap referensi untuk memastikan keterkaitan dengan topik utama. Sumber-sumber yang terpilih kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa tema, seperti pendidikan, keadilan sosial, kesetaraan peluang belajar, dan kesenjangan ekonomi.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan meninjau dan menginterpretasikan berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami keterkaitan antara pendidikan, keadilan sosial, dan pemerataan kesempatan belajar dalam konteks kesenjangan ekonomi yang masih terjadi. Melalui proses analisis tersebut, peneliti berupaya menggambarkan peran pendidikan sebagai instrumen penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kesetaraan peluang belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil kajian dari berbagai literatur dan memverifikasi konsistensinya antar sumber. Selain itu, dilakukan pula evaluasi kritis terhadap setiap referensi dengan memperhatikan kredibilitas penulis, tahun terbit, serta relevansinya dengan fokus penelitian. Langkah ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa hasil penelitian bersifat objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 dengan menggunakan metode studi pustaka. Melalui penelaahan terhadap berbagai literatur yang membahas kontribusi pendidikan dalam mengurangi ketimpangan ekonomi, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana pendidikan dapat berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesetaraan bagi peserta didik dari beragam latar belakang sosial ekonomi. Berdasarkan hasil telaah pustaka, ditemukan bahwa keadilan sosial dalam pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pemerataan akses terhadap pembelajaran, tetapi juga mencakup peningkatan mutu proses belajar agar setiap peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang adil dan setara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah proses yang dirancang secara sadar untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi manusia agar mampu belajar dengan kesadaran penuh, memiliki kepribadian yang baik, wawasan yang luas, keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan, kecerdasan intelektual, serta akhlak yang mulia berlandaskan nilai-nilai spiritual (Abd Rahman et al., 2022). Tujuan



utama dari proses ini adalah agar setiap individu dapat memberikan manfaat, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan sosialnya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, terdapat tiga unsur utama yang perlu bekerja sama secara harmonis, yaitu peserta didik, pendidik (guru), dan orang tua. Ketiganya memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi, sehingga kolaborasi yang baik di antara mereka menjadi kunci penting bagi tercapainya proses pendidikan yang efektif dan bermakna.

1. Peserta didik berperan aktif sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Mereka tidak hanya menerima ilmu, tetapi juga berpartisipasi dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilan diri.
2. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung proses pendidikan anak, baik melalui perhatian, motivasi, maupun pemantauan terhadap perkembangan akademik dan nonakademik anak.
3. Guru atau pendidik menjadi ujung tombak dalam keberhasilan pendidikan di sekolah. Mereka berperan tidak hanya mengajar, tetapi juga membimbing, menanamkan nilai, dan membentuk karakter siswa agar siap menghadapi masa depan dengan bekal ilmu dan akhlak yang baik (Purwaningsih et al., 2022).

Tujuan pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa sekaligus mengembangkan potensi peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, berpengetahuan luas, terampil, kreatif, serta berakhlak mulia. Tujuan tersebut juga menegaskan pentingnya kesiapan generasi muda dalam menghadapi era digital dan pesatnya kemajuan teknologi. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Indonesia diarahkan untuk menciptakan proses belajar yang berkualitas, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan zaman (Harahap et al., 2024).

Pendidikan menempati posisi yang sangat strategis dalam membentuk kualitas sumber daya manusia yang menjadi fondasi utama kemajuan suatu bangsa. Melalui pemerataan akses serta peningkatan mutu pendidikan, setiap warga negara memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan memperbaiki taraf hidupnya. Pendidikan juga berperan dalam menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, mengasah kreativitas, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan sosial. Ketika pendidikan dapat dinikmati secara merata, kesejahteraan masyarakat pun meningkat karena semua individu memiliki kesempatan yang adil untuk membangun masa depan yang lebih baik.

Lebih dari sekadar proses transfer ilmu pengetahuan, pendidikan berfungsi sebagai sarana pembentukan karakter, penguatan budaya, dan peneguhan jati diri bangsa. Melalui pendidikan, generasi muda diajarkan untuk mengenal, menghargai, dan melestarikan nilai-nilai budaya serta warisan luhur bangsa. Selain itu, pendidikan menumbuhkan sikap toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya melahirkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga berakhlak, berbudaya, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi (Suyatno, 2024).



B. Keadilan sosial

Keadilan sosial merupakan sebuah konsep yang tidak tampak secara langsung, namun memiliki makna yang sangat mendasar dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai arti keadilan itu sendiri (Idris et al., 2023). Istilah *sosial* merujuk pada hakikat manusia sebagai makhluk yang senantiasa berinteraksi, membangun hubungan, serta memberikan makna terhadap kehidupan bersama. Oleh karena itu, keadilan sosial dapat dipahami sebagai keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu dalam masyarakat, tanpa membedakan latar belakang suku, ras, budaya, agama, ataupun status sosial. Prinsip ini juga menjadi dasar penting dalam melindungi dan menjamin hak asasi manusia, karena menekankan kesetaraan dan perlakuan yang adil bagi seluruh warga negara. Nilai keadilan sosial bahkan secara tegas tercantum dalam sila kelima Pancasila sebagai salah satu pilar utama ideologi bangsa Indonesia (Tunisa et al., 2024).

Pendidikan merupakan hak fundamental yang seharusnya dimiliki oleh setiap individu. Di Indonesia, prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan yang bermutu tanpa adanya bentuk diskriminasi. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memikul tanggung jawab untuk memastikan tersedianya akses pendidikan yang merata serta menjamin setiap anak memperoleh kesempatan belajar sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya.

Dalam upaya mewujudkan sistem pendidikan yang berkeadilan sosial, gagasan mengenai demokratisasi pendidikan menjadi landasan utama. Demokratisasi pendidikan berarti memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menikmati haknya dalam bidang pendidikan tanpa terhalang oleh kondisi sosial, ekonomi, maupun letak geografis. Upaya ini dapat diwujudkan melalui berbagai strategi penting berikut ini:

1. Pemerataan kesempatan belajar

Pemerintah perlu memperluas akses pendidikan melalui program wajib belajar, pemberian beasiswa bagi siswa kurang mampu, serta dukungan dan insentif bagi guru yang bertugas di daerah terpencil.

2. Prinsip pendidikan untuk semua

Setiap anak, tanpa membedakan kondisi sosial maupun ekonomi, berhak memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan yang berkualitas. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan atau perbedaan dalam proses belajar di antara mereka.

3. Peran serta masyarakat

Orang tua dan lingkungan sekitar memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung keberhasilan pendidikan anak. Kesadaran kolektif tentang



pentingnya pendidikan perlu terus ditumbuhkan agar hak belajar setiap anak dapat terpenuhi (Mukhlis & Hafid, 2022).

Hubungan antara pendidikan dan keadilan sosial sangat erat. Melalui pendidikan yang merata dan inklusif, nilai-nilai keadilan dapat ditanamkan dan diwujudkan dalam kehidupan nyata. Pendidikan yang berkeadilan membantu membentuk masyarakat yang setara, di mana setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa terhambat oleh faktor ekonomi maupun sosial. Keadilan sosial dalam konteks pendidikan juga mencakup distribusi yang seimbang atas sumber daya, kesempatan, dan layanan pendidikan (Suyudi et al., 2023). Dengan demikian, pendidikan berfungsi sebagai sarana utama dalam menanamkan nilai keadilan sejak dini serta membangun masyarakat yang lebih adil, harmonis, dan berkeadaban.

C. Pendidikan kesetaraan

Pendidikan kesetaraan merupakan bentuk layanan pendidikan nonformal yang disusun untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal karena berbagai kendala, seperti faktor ekonomi, letak geografis, kondisi sosial, maupun hambatan psikologis. Program ini memiliki tujuan utama untuk mewujudkan pemerataan pendidikan yang adil dan inklusif bagi seluruh warga negara tanpa membedakan usia, latar belakang, ataupun status sosial ekonomi. Nilai dasar dari pendidikan kesetaraan berakar pada prinsip keadilan sosial dan kesamaan hak untuk mengakses pendidikan yang layak bagi setiap individu tanpa adanya diskriminasi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah berperan besar melalui penyediaan sarana, kebijakan yang mendukung, serta bantuan pendanaan. Namun demikian, keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat.

Meskipun telah mengalami berbagai kemajuan, penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan anggaran, ketimpangan mutu pembelajaran, serta sulitnya menjangkau daerah-daerah terpencil. Kendati demikian, program ini tetap menjadi langkah strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, karena memberikan peluang bagi seluruh warga untuk mengembangkan potensi diri sekaligus meningkatkan kualitas hidup. Pemerintah Indonesia terus berupaya mempersempit kesenjangan pendidikan melalui berbagai kebijakan yang menjamin setiap anak memperoleh hak belajar yang setara (Kintamani & Hermawan, 2012).

Salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut adalah pelaksanaan Program Indonesia Pintar (KIP), memberikan bantuan pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu agar kondisi ekonomi tidak menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang menengah. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) guna membantu pembiayaan kebutuhan operasional, seperti pengadaan buku, alat tulis, serta pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Program-program tersebut tidak hanya membantu



meringankan beban biaya pendidikan, tetapi juga memperkuat peran sekolah sebagai lembaga yang terbuka dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Untuk memperluas pemerataan akses pendidikan, pemerintah turut melaksanakan program afirmasi bagi para guru yang bertugas di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Bentuk dukungan tersebut diwujudkan melalui pemberian pelatihan, tunjangan khusus, serta bantuan profesional agar mutu pembelajaran di daerah-daerah terpencil dapat terus ditingkatkan. Kebijakan sekolah gratis di jenjang pendidikan dasar hingga menengah juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hak pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945.

Langkah penting lainnya adalah penerapan Kurikulum Merdeka, yang memberikan keleluasaan bagi sekolah dan pendidik untuk menyesuaikan proses pembelajaran dengan potensi serta kebutuhan peserta didik. Kurikulum ini diharapkan mampu menciptakan pengalaman belajar yang lebih relevan, kontekstual, dan bermakna, terutama bagi siswa yang berasal dari latar sosial ekonomi yang beragam.

Selain itu, pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi digital sebagai sarana pemerataan akses pendidikan. Perkembangan sistem pembelajaran daring serta munculnya berbagai platform digital membuka peluang belajar yang lebih luas bagi peserta didik, termasuk mereka yang tinggal di wilayah terpencil. Program seperti Siber Kreasi dan Rumah Belajar dari Kemendikbudristek menjadi contoh konkret bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pendidikan di seluruh Indonesia (Dalimunthe et al., 2025).

Namun, upaya menuju kesetaraan pendidikan masih menghadapi kendala besar, terutama pada aspek infrastruktur dan pemerataan teknologi. Sekolah-sekolah di kawasan perkotaan umumnya telah memiliki jaringan internet yang memadai, fasilitas belajar modern, serta tenaga pendidik yang terbiasa menggunakan teknologi. Sebaliknya, sekolah di wilayah 3T sering kali kekurangan akses listrik dan jaringan internet, sehingga menghambat penerapan pembelajaran digital. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan kemampuan digital antara siswa di kota dan di desa semakin melebar.

Selain keterbatasan infrastruktur, tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah minimnya tenaga pendidik dan rendahnya kompetensi digital guru. Banyak pendidik di daerah terpencil belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait penggunaan teknologi pembelajaran, sehingga penerapan sistem belajar berbasis digital belum optimal. Di sisi lain, keterbatasan ekonomi membuat sebagian siswa tidak memiliki perangkat belajar seperti laptop atau ponsel pintar, sementara biaya internet juga menjadi beban tambahan bagi keluarga berpenghasilan rendah.

Walaupun berbagai program bantuan telah digulirkan pemerintah, distribusinya masih belum merata dan belum sepenuhnya menjangkau daerah-daerah yang paling membutuhkan. Akibatnya, kesenjangan digital antara daerah maju dan tertinggal masih terus melebar. Siswa di kota besar dapat dengan mudah mengakses materi pembelajaran daring, sedangkan peserta didik di pedesaan sering tertinggal karena keterbatasan jaringan dan fasilitas belajar. Jika



permasalahan ini tidak segera diatasi, pemerataan dan kesetaraan pendidikan antarwilayah akan semakin sulit untuk diwujudkan (Sugari & Hilalludin, 2025).

D. Kesenjangan peluang belajar

Perbedaan kondisi ekonomi antara kelompok masyarakat mampu dan kurang mampu masih menjadi permasalahan mendasar dalam dunia pendidikan. Anak-anak dari keluarga sejahtera umumnya memiliki akses lebih luas terhadap fasilitas belajar yang lengkap, tenaga pendidik berkualitas, serta dukungan teknologi yang memadai. Sebaliknya, peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah sering kali bersekolah di lingkungan dengan sarana terbatas, ruang kelas yang kurang layak, dan minimnya akses terhadap teknologi pembelajaran.

Ketimpangan ini juga tampak jelas antara sekolah yang berada di kawasan perkotaan dan pedesaan. Sekolah di kota biasanya memperoleh perhatian lebih besar, baik dari pemerintah maupun masyarakat, dalam bentuk pendanaan, program peningkatan kualitas, dan ketersediaan guru yang berpengalaman. Sementara itu, sekolah di daerah pedesaan sering menghadapi kekurangan tenaga pendidik, fasilitas belajar yang minim, serta infrastruktur yang kurang memadai mulai dari akses jalan yang sulit hingga lemahnya jaringan internet.

Kondisi ekonomi keluarga turut memengaruhi kesempatan anak dalam menempuh pendidikan. Banyak anak dari keluarga miskin harus membantu orang tua bekerja untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga waktu belajar menjadi berkurang. Dalam beberapa kasus, keterbatasan biaya membuat mereka terpaksa berhenti sekolah. Situasi ini menghambat peluang mereka untuk memperbaiki taraf hidup di masa depan.

Perbedaan dalam fasilitas, kualitas tenaga pengajar, serta kemampuan memanfaatkan teknologi semakin memperlebar jurang yang memiliki sumber daya dan yang tidak. Di sekolah dengan sarana modern, peserta didik dapat belajar menggunakan komputer, internet, dan berbagai media digital interaktif. Namun di sekolah yang kekurangan dana, proses pembelajaran masih berlangsung secara tradisional, sehingga tidak mendukung pengembangan keterampilan digital. Akibatnya, terdapat kesenjangan dalam hasil belajar dan kompetensi antar siswa.

Secara keseluruhan, kesenjangan ekonomi berkontribusi langsung terhadap ketidakmerataan pendidikan. Ketika hanya sebagian masyarakat yang memiliki akses terhadap pendidikan bermutu, maka kesempatan untuk maju menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dari pemerintah dan masyarakat untuk memperbaiki fasilitas pendidikan di wilayah tertinggal, meningkatkan kesejahteraan guru, serta menjamin agar setiap anak—tanpa memandang latar belakang ekonomi memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang (Ningrum, P. et al., 2024).

Ketimpangan tersebut dipicu oleh kebijakan pembangunan ekonomi yang belum merata serta distribusi sumber daya yang tidak seimbang antarwilayah. Kondisi ini menciptakan perbedaan signifikan dalam kualitas hidup dan akses terhadap pendidikan (Zikram, F. & Khairunnisa, 2024). Untuk mengatasinya, pemerintah perlu memperkuat kebijakan pemerataan melalui berbagai program



seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta peningkatan kesejahteraan guru di daerah 3T.

Selain bantuan sosial, pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur pendidikan agar sekolah-sekolah di daerah terpencil dapat memiliki fasilitas yang setara dengan sekolah di perkotaan. Akses terhadap teknologi dan jaringan internet harus dijamin agar seluruh siswa di Indonesia dapat mengikuti proses pembelajaran dengan setara. Tidak kalah penting, peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan yang berfokus pada penguasaan teknologi dan penerapan metode pembelajaran modern menjadi kebutuhan yang mendesak.

Kesenjangan digital dalam dunia pendidikan kini menjadi isu yang semakin serius karena berpengaruh langsung terhadap peluang belajar peserta didik. Tidak semua siswa memiliki perangkat teknologi dan akses internet yang memadai, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berasal dari keluarga kurang mampu. Sementara di kota dapat dengan mudah mengikuti pembelajaran daring, mereka yang berada di daerah tertinggal sering kali tertinggal karena keterbatasan sarana. Ketimpangan ini memengaruhi capaian belajar, tetapi juga memperlebar kesenjangan dalam kemampuan literasi digital dan kesiapan menghadapi dunia modern yang berbasis teknologi.

Guru pun menghadapi kendala yang sama, karena tidak semua siswa dapat mengikuti pembelajaran daring secara penuh. Meski demikian, beberapa sekolah mulai berupaya menutup kesenjangan tersebut dengan menyediakan fasilitas komputer dan akses internet gratis bagi peserta didik. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak agar setiap anak memiliki peluang belajar yang sama (Sinambela et al., 2024).

Tabel 1. Dampak kesenjangan terhadap peluang belajar

No	Aspek kesenjangan	Dampak terhadap peluang belajar
1.	Teknologi	Banyak siswa tidak memiliki perangkat seperti laptop atau ponsel karena keterbatasan ekonomi, sehingga sulit mengikuti pembelajaran digital dan kehilangan kesempatan belajar yang setara.
2.	Keterbatasan akses internet	Siswa di daerah pedesaan sering menghadapi jaringan internet yang lemah atau bahkan tidak tersedia, menghambat mereka dalam mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran online.
3.	Kesenjangan dalam peluang belajar	Perbedaan akses teknologi membuat siswa yang memiliki perangkat lebih unggul dalam literasi digital dan pembelajaran mandiri dibandingkan yang tidak memiliki.
4.	Dampak bagi guru dan proses pembelajaran	Guru kesulitan menyampaikan materi secara efektif karena sebagian siswa harus belajar manual, sementara yang lain mengikuti kelas digital.



5.	Upaya sekolah mengatasi kesenjangan	Sekolah berusaha menyediakan laboratorium komputer dan Wi-Fi agar semua siswa bisa belajar digital serta memberikan alternatif pembelajaran luring bagi yang tidak memiliki perangkat.
6.	Tantangan dan harapan ke arah depan	Pemerintah dan sekolah perlu memperluas akses teknologi dan pelatihan digital bagi guru dan siswa agar semua peserta didik siap menghadapi era pembelajaran modern.

Kesenjangan ekonomi serta keterbatasan akses terhadap teknologi masih menjadi persoalan mendasar dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Banyak peserta didik yang belum memiliki perangkat digital maupun koneksi internet yang layak, sehingga tertinggal dalam mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. Situasi ini menunjukkan bahwa pemerataan pendidikan tidak cukup dicapai hanya melalui kebijakan formal, melainkan juga memerlukan dukungan nyata berupa penyediaan sarana belajar, pelatihan bagi guru, dan pembangunan infrastruktur digital. Apabila kesenjangan ini tidak segera diatasi, maka perbedaan kualitas pendidikan antarwilayah akan semakin melebar dan menimbulkan ketimpangan sosial yang lebih serius.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Pemerintah perlu memperluas cakupan program bantuan pendidikan serta memperkuat infrastruktur teknologi, terutama di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Sementara itu, sekolah perlu terus berinovasi dalam menciptakan sistem pembelajaran yang dapat dijangkau oleh seluruh peserta didik, baik melalui metode daring maupun luring. Dengan upaya konkret dan kerja sama yang berkelanjutan, diharapkan semua siswa memiliki kesempatan belajar yang setara serta dapat mengembangkan potensi dirinya secara optimal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan sosial di tengah masih lebarnya kesenjangan ekonomi yang menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Upaya memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas tenaga pendidik, serta menyediakan sarana dan prasarana belajar yang memadai merupakan langkah strategis untuk menjamin pemerataan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan karakter, penanaman nilai moral, dan penguatan kesadaran sosial yang dapat memperkecil jurang ketimpangan antar kelompok sosial. Melalui sistem pendidikan yang inklusif, humanis, dan berkeadilan, setiap individu diharapkan memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensi serta keunikan dirinya.

Dari sisi konseptual, hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam. Pendidikan Islam harus menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, empati, dan tanggung jawab



kemanusiaan dalam setiap proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan dalam kurikulum serta metode pengajaran agar tidak hanya berfokus pada aspek kognitif, tetapi juga memperkuat dimensi spiritual, moral, dan sosial. Pendidikan Islam idealnya menjadi penggerak utama dalam membangun sistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an dan prinsip *rahmatan lil 'alamin*. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berperan sebagai kekuatan transformasi yang membentuk masyarakat yang adil, berilmu, dan berakhlak mulia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Rahman, BP, Munandar, SA, Fitriani, A., Karlina, Y., & Yumriani, Y. (2022). PENGERTIAN PENDIDIKAN, ILMU PENDIDIKAN DAN UNSUR-UNSUR PENDIDIKAN. *PT.Fajar Interpratama Mandiri*, 2(1), 43.
- Cahyono, A. D. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>
- Dalimunthe, S. M., Rambe, M. H., & Dwinta, N. (2025). El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran Solusi Krisis Pendidikan Di Daerah 3T: Pendekatan dan Inovasi Untuk Kemajuan. *El-Banar: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran*, 8(1), 1–20.
- Fabela Zikram, & Khairunnisa, A. (2024). 50.+jurnal+Zikram+F (1). *Jurnal Riset Ilmiah*, 3(DAMPAK KESENJANGAN SOSIAL DI INDONESIA), 3162. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/3004/2968>
- Harahap, R. R., Wakit, S., Santosa, Y. B. P., Budi, S., Abd Majid, M. S., Widodo, B., Syarifah, T., Hadikusumo, R. A. ., Afryanti, F., Wijayati, R. D., Susilaningsih, C. Y., Arini, D., Sholihin, C., & Ilham. (2024). *Pengantar Pendidikan* (M. Anas (ed.)).
- Hujaimah, S., Fadhilah, A. A., Fiqri, R., Sasmita, P., Salsabila, N., Mariani, M., Nugraha, D. M., & Santoso, G. (2023). Faktor, Penyebab, dan Solusi Kesenjangan Sosial Dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(06), 142–148.
- Idris, I., Arief, A., & Saihu, M. (2023). Keadilan Sosial dalam Perspektif Al-Qur'an. *Journal of Creative Student Research*, 1(4), 57–75.
- Kamaruddin, S. A. (2025). *Peran Pendidikan dalam Pembangunan Masyarakat Tangguh Bencana (Perspektif Sosiologi)*. 8.
- Kintamani, I., & Hermawan, D. (2012). the Performance of Equality Education As a Type of Non Formal Education. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 18(1), 65–84. <https://media.neliti.com/media/publications/118664-none-884b9bb1.pdf>
- Mukhlis, & Hafid. (2022). *Kariman* , Volume 08 , Nomor 01 , Juni 2020 | 141



- Mukhlis. *Kariman, Volume 08*, (PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL), hlm 148.
- Prawesti Ningrum, E., M, S., Endah Nursyamsi, S., & Siregar, N. (2024). Faktor Terkait Kesenjangan Ekonomi dan Kesejahteraan. *PRIVE: Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 116–126. <https://doi.org/10.36815/prive.v7i2.3480>
- Purwaningsih, I., Oktariani, O., Hernawati, L., Wardarita, R., & Utami, P. I. (2022). PENDIDIKAN SEBAGAI SUATU SISTEM. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 10(1), 21. <https://doi.org/10.33394/vis.v10i1.5113>
- Saing, S. A., Maruapey, H., & Santoso, G. (2023). Eksplorasi Peran Keadilan Sosial dan Budaya Dalam Menciptakan Lingkungan Pendidikan Yang Inklusif *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(03), 407–418.
- Sihombing, R. (2023). Pemerataan Pendidikan: Studi Kasus 34 Provinsi di Indonesia. *Parahyangan Economic Development Review*, 1(2), 143–151. <https://doi.org/10.26593/pedr.v1i2.6670>
- Sinambela, S. M., Lumbantobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A. F., Nisa, C., Simanjuntak, J. P., & Jamaludin. (2024). Kesenjangan Digital dalam Dunia Pendidikan Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang (Studi Kasus di SMP N 35 Medan) San. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 2(3), 15–24. <https://ejurnal.stie-trianandra.ac.id/index.php/JUBPI/article/view/3003>
- Sugari, D., & Hilalludin, H. (2025). Kesetaraan Akses Pendidikan Teknologi Tantangan dan Peluang di Indonesia dan Dunia. *Jurnal Of Multidisiplinary Research*, 1(1), 44–56.
- Suyatno. (2024). *Dasar-dasar Pendidikan* (A. Ulinnuha & S. Khoriyati (ed.); Pertama). PT Bumi Aksara.
- Suyudi, A., Santoso, G., & Muhammadiyah Jakarta, U. (2023). Pertimbangan tentang bagaimana keadilan dapat diterapkan dalam distribusi sumber daya, hak, dan peluang di Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 02(03), 448–454.
- Tunisa, R. L., Asbari, M., Diyaul, A., & Utami, U. R. (2024). Pendidikan: Kunci Keadilan Sosial. *Jisma (Journal of Information Systems and Management)*, Vol 03(2), 76–79.
- Vega, A., Maharani, I. V. A., Putri, J. A., Hartono, M. R. A. M., & Navridya, R. U. (2025). Kesetaraan Akses Pendidikan: Analisis Pengimplementasian Nilai Pancasila Dalam Pemerataan Akses Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Ilmu*, 1(2), 44–57. <https://doi.org/10.59971/li.v1i2.51>
- Wardana, A., Kharisma, B., & J. S Nurul. (2019). *Ketimpangan Pendidikan dan Pendapatan di Indonesia*. 23(1).